



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2019



DISHANPAN

Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mendorong dilakukannya penataan perangkat daerah hingga ditetapkan Perda No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut menetapkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan (Pasal 2). Pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan yang diatur dengan Pergub Jateng Nomor 66 Tahun 2016.

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

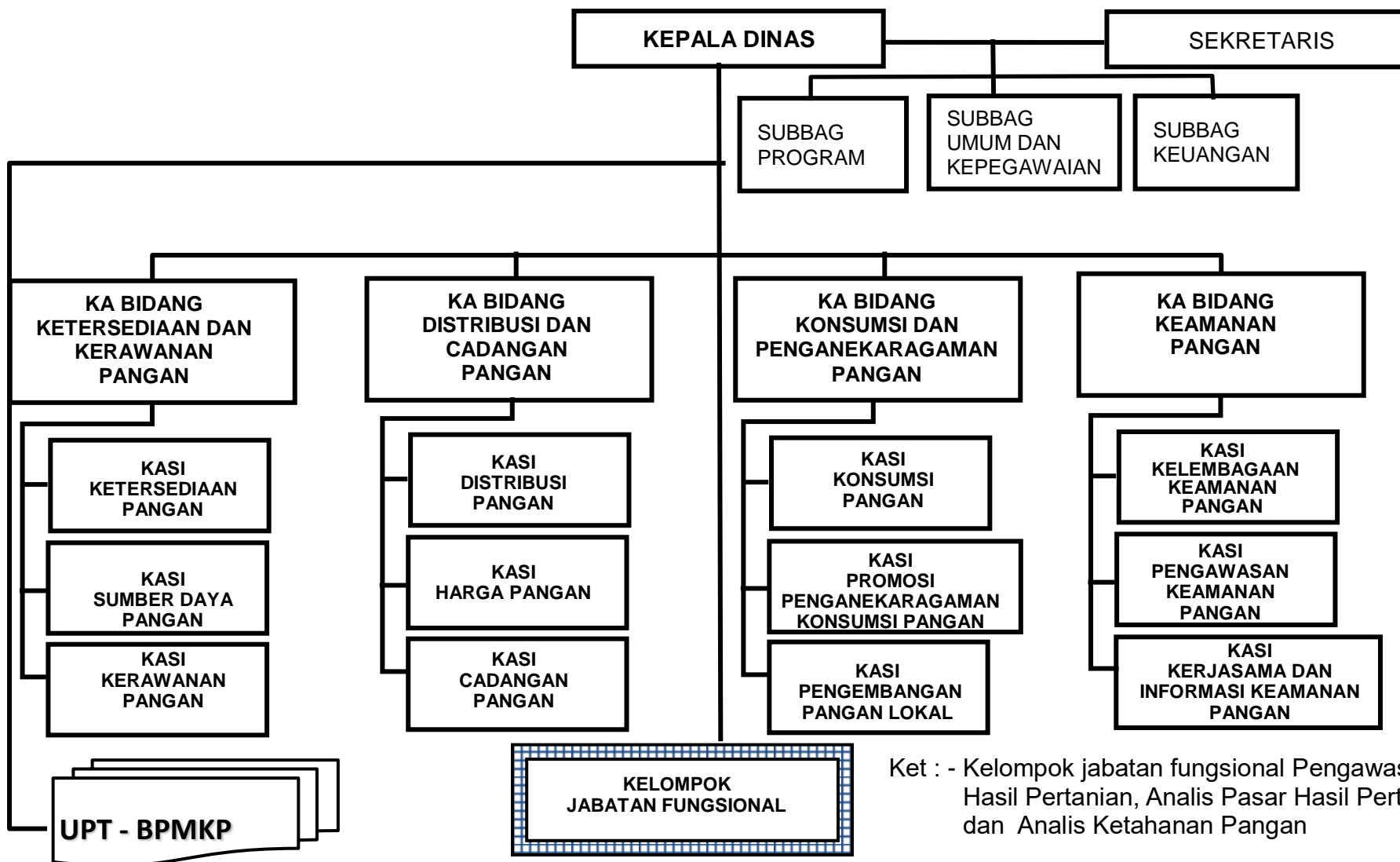
1. perumusan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
2. pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
4. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya

Diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang mencabut Peraturan Gubernur Jawa

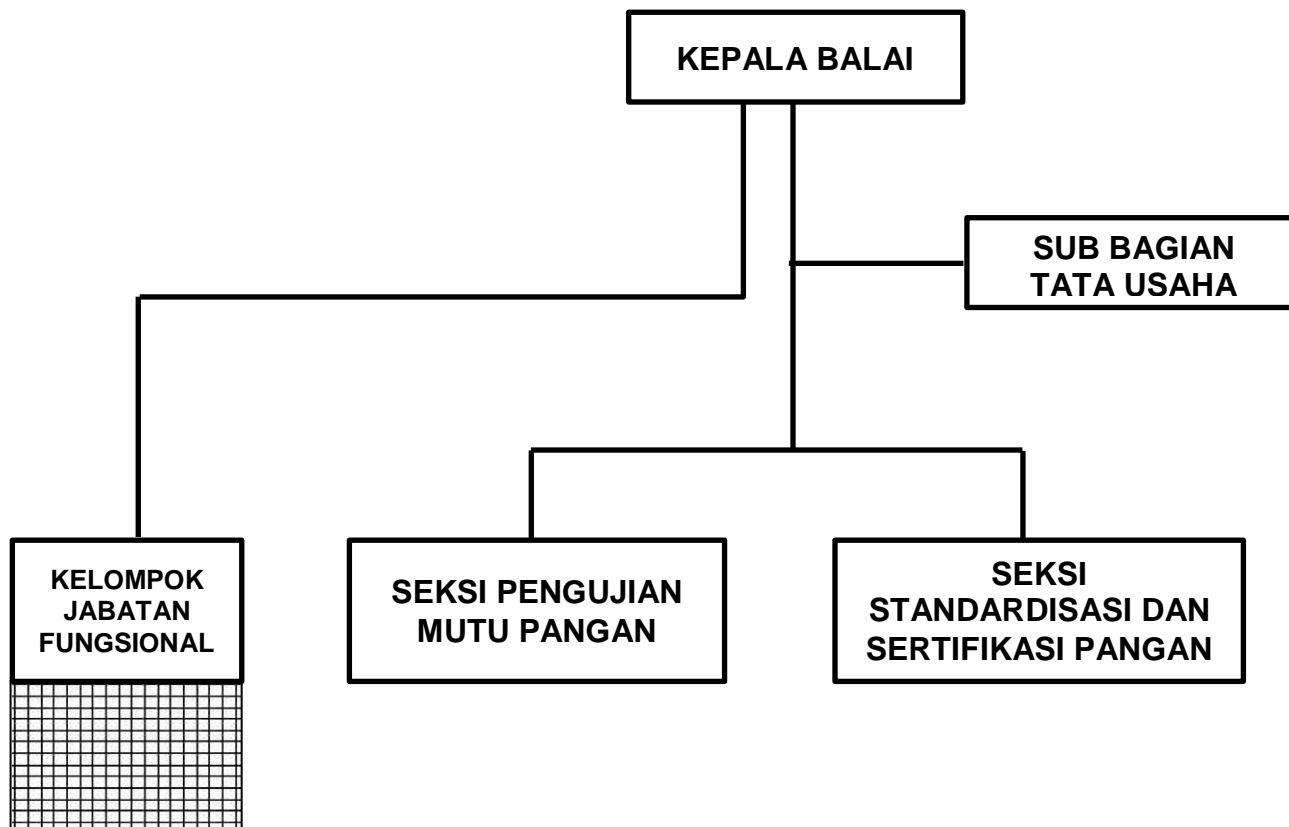
Tengah Tahun 111 Tahun 2016, terdapat perubahan pada beberapa tugas dan fungsi, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Tugas dan fungsi Balai Cadangan Pangan (BCP) dialihkan ke Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan serta Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan. Berdasarkan Rekomendasi Kementerian Dalam Negeri, perlu dibentuk Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) yang menggantikan sebagian tugas dan fungsi pada Bidang Keamanan Pangan.

Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 6 (enam) Pejabat Administrator yang dibantu oleh 2 atau 3 Pejabat Pengawas sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1.

**Gambar 1.1. Struktur Organisasi
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**



**Gambar 1.2. Struktur Organisasi
UPT Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) Provinsi Jawa Tengah**



Tugas Pokok dan Fungsi setiap bidang, sekretariat dan UPT adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi Subbagian Program, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian

- 1) **Sub bagian Program** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.
- 2) **Sub bagian Keuangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.
- 3) **Sub bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

2. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan, sumber daya pangan, dan kerawanan pangan.

Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya pangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerawanan pangan.

Bidang Ketersediaan Pangan membawahi Seksi Ketersediaan Pangan, Sumber Daya Pangan dan Kerawanan Pangan.

- 1) Seksi Ketersediaan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketersediaan Pangan;
- 2) Seksi Sumber Daya Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya pangan;
- 3) Seksi Kerawanan Pangan** melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerawanan pangan.

3. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang harga pangan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang cadangan pangan.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan Seksi Distribusi Pangan, Seksi Harga Pangan dan Seksi Cadangan Pangan.

- 1) Seksi Distribusi Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan
- 2) Seksi Harga Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang harga pangan
- 3) Seksi Cadangan Pangan** melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang cadangan pangan

4. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penganekaragaman dan konsumsi pangan. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi panganekaragaman konsumsi pangan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pangan lokal.

Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan, membawahkan Seksi Konsumsi Pangan, Seksi Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan dan Seksi Pengembangan Pangan Lokal.

- 1) **Seksi Konsumsi Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan
- 2) **Seksi Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi panganekaragaman konsumsi pangan
- 3) **Seksi Pengembangan Pangan Lokal** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pangan lokal

5. Bidang Keamanan Pangan

Bidang keamanan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan dan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan. Bidang Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan keamanan pangan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan pangan, dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama dan informasi

Bidang Keamanan Pangan, membawahkan Seksi Kelembagaan Pangan, Seksi Pengawasan Keamanan Pangan, Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.

- 1) **Seksi Kelembagaan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan Keamanan Pangan
- 2) **Seksi Pengawasan Keamanan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan pangan
- 3) **Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama dan informasi keamanan pangan

6. Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A

Balai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Ketahanan Pangan di bidang peningkatan mutu dan keamanan pangan. Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang sistem jaminan mutu keamanan pangan, pengujian, standardisasi dan sertifikasi pangan;
- b. koordinasi, pelaksanaan teknis operasional di bidang sistem jaminan mutu keamanan pangan, pengujian, standardisasi dan sertifikasi pangan;

- c. menyiapkan fasilitasi sertifikat produk organik;
- d. evaluasi dan pelaporan di bidang sistem jaminan mutu keamanan pangan, pengujian, standardisasi dan sertifikasi pangan;
- e. pengelolaan ketatausahaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Balai, membawahi Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengujian Mutu Pangan, Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Pangan, dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018.

- 1) Subbagian Tata Usaha**, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- 2) Seksi Pengujian Mutu Pangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan mutu pangan.
- 3) Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Pangan**, mempunyai tugas penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan sertifikasi pangan.

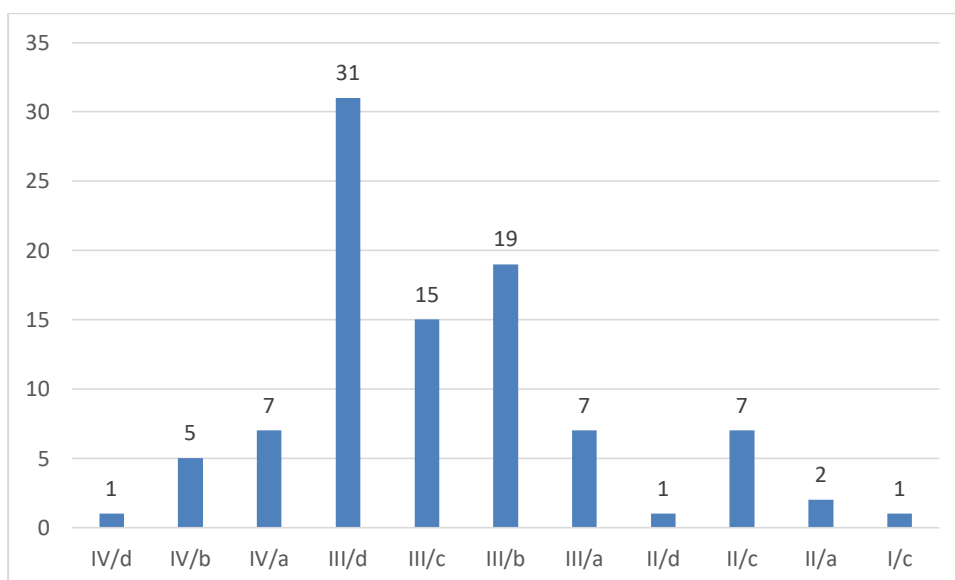
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasar kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan

terhadap Pejabat Fungsional, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh kekuatan sumberdaya manusia sebanyak 96 orang. Terdiri dari 25 pejabat eselon, yaitu: 1 orang pejabat eselon II, 6 orang pejabat eselon III, 18 orang eselon IV dan 62 jabatan fungsional umum, 5 orang staf fungsional tertentu dan 4 Calon Pengawai Negeri Sipil yang berdasarkan kepangkatan dan golongan terinci sebagai berikut (Gambar 2).

Gambar 2.
ASN berdasar Golongan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

- a. Bangunan gedung 3 (tiga) lantai di Komplek Pertanian Tarubudaya Ungaran Jawa Tengah, 1 (satu) gedung kantor, 2 unit gudang cadangan pangan pemerintah dan lantai jemur (kapasitas 10 ton GKG), 1 unit TTI Center, 2 unit gedung laboratorium (Ungaran dan Solo), 1 unit bangunan kantor (BPMKP Solo), 1 unit aula , 1 unit musholla, 9 unit rumah dinas

- b. Ruang rapat kecil 1 buah, kapasitas kurang lebih 100 orang dimanfaatkan untuk kegiatan koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas
- c. Mesin komputer sebanyak 50 (lima puluh) dan 23 (dua puluh tiga) Notebook, 25 (dua puluh lima) UPS, 52 (lima puluh dua) printer dan
- d. Jaringan mesin telepon/fax 12 (dua belas) dengan perincian sebagai berikut: mesin fax 6921997; mesin telepon 6925554, 6921046, 6921972, 6923158, 6922411, 6923412, 6921159, 6925268, 6924604 dan (0271) 851375
- e. Televisi sebanyak 15 (lima belas) unit
- f. Sebanyak 48 (empat puluh delapan) AC split, 5 (lima) AC floor dan 15 (sepuluh) kipas angin yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kenyamanan ruangan
- g. LCD sebanyak 9 (sembilan) unit
- h. Camcoder DVD 1 (satu) unit
- i. Mobil operasional 13 (tiga belas) unit
- j. Sepeda Motor 16 (enam belas) unit
- k. 3 (tiga) unit Rice Mile Unit (RMU)
- l. 1 (satu) unit dryer
- m. 1 (paket) sebanyak 316 unit peralatan laboratorium (solo dan ungaran)

B. Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Jawa Tengah. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan yang perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang ada di Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Regulasi untuk mendukung pelaksanaan urusan pangan di daerah masih kurang.
2. Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata.
3. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa) yang berpotensi menimbulkan rawan pangan.
4. Lemahnya pasokan dan akses pangan
5. Kurangnya Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal.
6. Masih terjadi kasus keracunan pangan di masyarakat dan beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi.
7. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi pangan yang berpotensi menghambat akses fisik dan memicu terjadinya disparitas harga bahan pangan antar daerah dan ketidakstabilan harga.

C. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Istansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya LKjIP yang diawali dengan uraian singkat tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan

Pangan Provinsi Jawa Tengah .Selain itu dimuat pula tentang landasan hukum penyusunan LKjIP dan aspek strategis / isu strategis, keterkaitan dengan Renstra dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah .

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini berisi Tujuan dan Sasaran yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah dilengkapi dengan rencana kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini memuat penjelasan prioritas proram dan kegiatan beserta analisis capaian kinerja Kantor serta akuntabilitas keuangan (Realisasi Anggaran).

BAB IV. PENUTUP

. Bab ini memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis.

Perencanaan strategis dilaksanakan mengacu pada dokumen RPJMD 2018 – 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023. Renstra adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2018 – 2023.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah.

1. Visi

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah:

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI

“Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Jawa Tengah tahun 2013-2018. Makna yang terkandung dalam visi sebagai berikut:

a. Sejahtera

Masyarakat Jawa Tengah Sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata berprinsip pada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Masyarakat sejahtera juga terbebas dari ketidakmerdekaan, kebodohan, kesakitan, kelaparan, serta ancaman dari perlakuan atau tindak kekerasan fisik maupun non fisik. Dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera akan tercipta hubungan sosial yang nyaman dan aman, tanpa adanya diskriminasi SARA, serta tercipta relasi yang dinamis, saling menghargai, saling pengertian, dan toleransi yang tinggi. Ketercukupan kebutuhan masyarakat juga didukung dengan pemenuhan prasarana dan sarana dasar, pelayanan publik, ruang publik,

transportasi, serta teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus, untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

b. Berdikari

Berdikari merupakan sebuah tujuan agar masyarakat mampu memenuhi segala kebutuhan dasarnya secara mandiri dan cukup. Dengan begitu, berdikari menjadi sebuah metode untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidupnya berbasis modal pokok milik sendiri, baik sumberdaya alam, manusia, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sedangkan sumberdaya yang berasal dari luar merupakan tambahan apabila diperlukan.

Perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari dilandasi semangat dan nilai utama ***Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi***. Nilai ini dimanifestasi dalam sikap, tindakan, dan laku seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk dapat bersama mencapai kesejahteraan yang berdikari.

2. Misi

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. **Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi implementasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyub ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan menguatkan pemahaman keberagaman dan kebhinekaan sejak usia dini, mengembangkan ruang-

ruang publik untuk membangun komunikasi antar masyarakat melalui kegiatan seni dan rekreasi, serta mendorong kearifan lokal dalam bentuk gerakan-gerakan masyarakat termasuk gerakan gotong royong. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik sosial maupun agama, bahkan konflik SARA, dan tercipta kohesi sosial masyarakat yang baik.

2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota

Misi kedua ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Jawa Tengah berlandaskan nilai "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapus*". Dalam lima tahun kedepan, reformasi birokrasi diharapkan semakin diperluas sampai ke pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun open government dan pemerintahan yang responsif. *Open government* dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam respon pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu tagline pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Jawa Tengah kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil

(*outcome*). Untuk itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam *quality assurance* aparatur.

3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar.

Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani, nelayan, pelaku UKM dan pekerja. Program pengentasan kemiskinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, memperhitungkan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktek ekonomi biaya tinggi. Program pengentasan kemiskinan ke depan juga diarahkan untuk fokus pada pendidikan dan kesehatan terutama bagi rumah tangga miskin pada dua desil terbawah, serta masyarakat terlantar melalui penyediaan data BDT yang telah tervalidasi dengan sebaran pada wilayah kabupaten/kota miskin di Jawa Tengah. Perluasan lapangan pekerjaan juga menjadi penting bukan hanya untuk mengatasi pengangguran, namun juga bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja untuk bisa bekerja lebih dari 15 jam per minggu.

4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

Misi keempat mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Jawa Tengah, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera.

Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Jawa Tengah yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Jawa Tengah tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Jawa Tengah, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

3. Tujuan

Meningkatkan ketahanan pangan.

4. Sasaran

Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan dimaksud, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu lima tahun ke depan yaitu meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas.

Dalam rangka memujudkan tujuan dan sasaran agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai dan rasional yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap sasaran yang telah

ditetapkan. Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kinerja Pelayanan
Dinas Ketahanan Pangan

| Tujuan/Sasaran (2) | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 (5) | 2020 (6) | 2021 (7) | 2022 (8) | 2023 (9) |
| Tujuan 1: Meningkatkan ketahanan pangan | Indikator Tujuan: Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | 87.36 | 87.72 | 88.08 | 88.44 | 88.8 |
| Sasaran 1: Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas | Indikator Sasaran: PPH Ketersediaan | 82.75 | 83 | 83.25 | 83.5 | 83.5 |
| | Angka Kecukupan Gizi (Angka Konsumsi Energi) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| | Angka Kecukupan Energi (Angka Konsumsi Protein) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Tujuan 2: Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah | Nilai Kepuasan Masyarakat | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Sasaran 2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah | Nilai Kepuasan Masyarakat | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Sasaran 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai SAKIP PD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

B. Perjanjian Kinerja Tahu 2019

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya

sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2019. Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Dinas Ketahanan Pangan yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2019 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dituangkan dalam 3 (tiga) program yaitu: Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah dan Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; kemudian dijabarkan dalam 42 kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 23.500.000.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan komposisi anggaran pendukung pencapaian sasaran strategis 1 sebesar Rp. 19.070.000.000,- (sembilan belas milyar tujuh puluh juta rupiah), sasaran strategis 2 sebesar Rp. 3.755.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta) dan sasaran strategis 3 sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh

puluh lima juta). Masing-masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Tahun 2019, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah ini dilaksanakan guna mengukur atau untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam program, kebijakan, sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis 2018 – 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah ini menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Sedangkan untuk pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Selain pencapaian setiap sasaran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga menyajikan capaian kinerja kegiatan tahun 2019. Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan meliputi Indikator masukan (Input), keluaran (Output), hasil (Outcome), manfaat (Benefit) dan dampak (Impact). Akan tetapi untuk sementara ini, dari lima indikator hanya digunakan tiga indikator yakni hanya sampai indikator hasil (Outcome) dengan argumen kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah untuk Benefit dan Impact belum dapat dilakukan mengingat pengukuran yang relatif.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

| NO | SKALA CAPAIAN KINERJA | KATEGORI |
|-----------|------------------------------|-----------------|
| 1 | Lebih dari 100% | Sangat Baik |
| 2 | 75 – 100% | Baik |
| 3 | 55 – 74 % | Cukup |
| 4 | Kurang dari 55 % | Kurang |

Pada tahun 2019, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, terdapat 3 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tolok ukur capaian sasaran strategis meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu:

1. PPH Ketersediaan
2. Angka Kecukupan Gizi (Angka Konsumsi Energi)
3. Angka Kecukupan Energi (Angka Konsumsi Protein)

Tolok ukur capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu:

1. Nilai Kepuasan Masyarakat

Tolok ukur capaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu:

1. Nilai SAKIP PD

Untuk mengukur capaian kinerja pada Ketiga Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas

Capaian kinerja sasaran 1 tercapai sebesar 104,25 % atau kategori sangat Baik. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD telah tercapai sebesar 103,84% dari target akhir Tahun Renstra. Indikator kinerja sasaran ini merupakan indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra 2018-2023 dan belum menjadi indikator dalam Renstra lama sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Tabel 3.2.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas

| No | Indikator Kinerja | Real. 2018 | Tahun 2019 | | | Target Akhir Renstra (2023) | % Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2019) |
|---|---|------------|------------|-------|---------------|-----------------------------|--|
| | | | Target | Real. | % Capaian | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | PPH Ketersediaan | 85,3 | 82,5 | 86 | 104,24 | 83,5 | 102,99 |
| 2. | Angka Kecukupan Gizi (Angka Konsumsi Energi) | 2.090,17 | 2.150 | 2.151 | 100,05 | 2.150 | 100,05 |
| 3. | Angka Kecukupan Energi (Angka Konsumsi Protein) | 63,7 | 57 | 61,83 | 108,47 | 57 | 108,47 |
| Prosentase Capaian Sasaran Strategis | | | | | 104,25 | | 103.84 |

Dari tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 1 tercapai sebesar 104,25% atau kategori sangat Baik. Secara lebih rinci pencapaian sasaran dari indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagaimana dijelaskan dengan uraian berikut :

a. Capaian Indikator Sasaran PPH Ketersediaan

Indikator sasaran PPH Ketersediaan dengan target 82,5 tercapai sebesar 86 atau tercapai sebesar 104,24% dari target ditetapkan. Upaya pencapaian target kinerja tersebut dengan melaksanakan target program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu :

1. Indikator program ketersediaan energi pangan beragam dan berkualitas dengan target sebesar 4.000 Kkal/Kapita/Hari dan indikator program ketersediaan protein pangan beragam dan berkualitas dengan target sebesar 107 gram/kapita/Hari. Pencapaian target ketersediaan energi sebesar 100, 58% atau ketersediaan energi sebesar 4.023 Kkal/Kapita/Hari dan target ketersediaan protein sebesar 100,72% atau ketersediaan protein sebesar 107,77 gram/Kapita/Hari.

Upaya pencapaian target tersebut melalui:

a. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Pangan

Target kinerja kegiatan jumlah rekomendasi tercapai 100% atau tersusun 1 rekomendasi terkait ketersediaan bahan pangan (dalam bentuk energi, protein dan lemak) untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu di wilayah Jawa Tengah. Rekomendasi ini disusun berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Makanan Tahun 2019. NBM disusun setiap tahun dengan mengacu pada metode yang disusun oleh *Food and Agriculture Organization (FAO)* dengan mempertimbangkan kondisi dan ketersediaan data yang ada.

Kegiatan ini di dukung dengan dana sebesar Rp. 150.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.150.000.000,- atau terserap 100 persen dengan demikian penggunaan anggran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

- b. Kegiatan Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Pangan
Target 5 kelompok dan tercapai seluruhnya atau tercapai 100%.



Kelompok mendapatkan stimulan pengembangan komoditas umbi-umbian (ubi kayu dan ubi jalar) untuk mendukung peningkatan ketersediaan energi dan protein

di Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2019, stimulan dilaksanakan di Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Magelang dan Karanganyar.



Kegiatan ini di dukung dengan dana sebesar Rp. 250.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.214.100.000,- atau terserap 85,64 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut

pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan sisa merupakan sisa pagu kontrak pengadaan bahan/bibit tanaman yang diserahkan kepada masyarakat.

2. Indikator program persentase penanganan daerah rawan pangan dengan target sebesar 85, tercapai target sebesar 95,24% atau 20 Kabupaten/Kota tertangani dari 21 Kabupaten/Kota yang mengalami rawan pangan transien dan/atau kronis.



Upaya pencapaian dengan target tersebut melalui: kegiatan peningkatan kemandirian dan penanganan kerentanan pangan di masyarakat serta penyaluran cadangan pangan

(gabah) untuk masyarakat yang mengalami rawan pangan transien dan/atau kronis, akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, kemiskinan dan/atau gejolak harga. Untuk meningkatkan kemampuan antisipasi kondisi rawan pangan dan

penanganan rawan pangan dilakukan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan upaya untuk menggerakkan pemberdayaan masyarakat rawan pangan, melalui program desa mandiri pangan melalui pemberian stimulan ternak kambing untuk kelompok afinitas di 34 desa.

Kegiatan ini di dukung dengan dana sebesar Rp. 3.900.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.3.831.941.975,- atau terserap 98,25 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan sisa pagu kontrak pengadaan ternak kambing dan domba serta efisiensi perjalanan dinas.



3. Indikator program koefisien variasi (CV) harga pangan strategis (beras, cabai, bawang merah) tercapai target sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.3. CV merupakan salah satu tolok ukur stabilisasi harga. Semakin kecil CV, maka harga semakin stabil. Capaian tersebut menunjukkan bahwa harga pangan strategis relatif stabil. Upaya pencapaian dengan target tersebut melalui:

- a. Kegiatan Pemantauan Harga dan Stabilisasi Harga Pangan dengan target kegiatan jumlah intervensi harga pangan strategis (beras, cabe, bawang merah) sebanyak 5 kali dan jumlah TTI Center yang difasilitasi sebanyak 1 paket, terealisasi sebanyak 10 kali dan 1 paket.



Tabel 3.3.
Capaian Kinerja Indikator Program Koefisien Variasi (CV)
Harga Pangan Strategis

| No. | Indikator Kinerja | Real. 2018 | Tahun 2019 | | | Target Akhir Renstra (2023) | % Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2019) |
|-----|--|------------|------------|--------|-----------|-----------------------------|--|
| | | | Target | Real. | % Capaian | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | CV Harga Pangan Strategis Beras | 4.38 | 5.00 | 1.17% | 427.35% | 5.00 | 427.35% |
| 2. | CV Harga Pangan Strategis Cabai | 22.60 | 44.00 | 25.10% | 175.30% | 40.00 | 159,36% |
| 3. | CV Harga Pangan Strategis Bawang Merah | 20.18 | 29.00 | 23.85% | 121.59% | 25.00 | 104,82% |

Untuk menjaga stabilitas harga pangan agar pangan dapat terjangkau oleh masyarakat dilaksanakan berbagai upaya seperti koordinasi lintas sektor, pemantauan harga, ketersediaan, distribusi pangan terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Informasi harga, pasokan dan akses pangan dikumpulkan secara rutin atau periodik untuk dapat digunakan sebagai bahan pembuatan analisis perumusan kebijakan yang terkait dalam distribusi pangan yang mencakup komoditas beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah yang disajikan mingguan/bulanan yang berada di tingkat produsen dan konsumen. Selain itu adanya intervensi pada komoditas penting (beras, cabe, dan bawang merah) serta adanya Pasar Tani dan Toko Tani Center yang menjual komoditas penting tersebut dengan harga terjangkau, dapat meningkatkan kestabilan harga.

Kegiatan ini di dukung dengan dana sebesar Rp 895.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 889.225.000,- atau terserap 99,52 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan, sisa anggaran merupakan sisa pagu kontrak kegiatan pasar murah, stabilisasi harga beras, cabai dan bawang merah.

- b. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan peningkatan akses Pangan dengan target kegiatan: (i) Jumlah gapoktan yang difasilitasi sebanyak 35 terealisasi sebanyak 35, (ii) Jumlah Korporasi tani yang difasilitasi sebanyak 2 terealisasi sebanyak 2, (iii) Jumlah promosi produk pertanian sebanyak 4 terealisasi sebanyak 4, dan (iv) Data rantai pasok dan jaringan distribusi pangan strategis (Sistem Logistik Daerah) sebanyak 1 terealisasi sebanyak 1. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat dengan memperpendek rantai pasok dan jaringan distribusi pangan serta meningkatkan akses pangan masyarakat pada kondisi tertentu.



Kegiatan ini di dukung dengan dana sebesar Rp 2.250.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 2.243.149.000,- atau terserap 99,70 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan, sisa anggaran merupakan efisiensi honorarium dan perjalanan dinas, sisa pagu kontrak pengadaan dalam rangka penyelenggaraan HPS tingkat Provinsi, fasilitasi gabah sebagai sarana pengembangan distribusi pangan, bahan percontohan usaha petani berbasis korporasi, belanja makan dan minuman pada penyelenggaraan HPS tingkat Provinsi dan pembuatan aplikasi SISLOGDA.

4. Rasio cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan masyarakat dengan target sebesar 0,44 tercapai target sebesar 104,55%. Capaian rasio cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan masyarakat sebesar 0,46 dihitung dari jumlah stok cadangan pangan pada 289 unit lumbung sebesar 434,36 Ton setara beras dibagi

kebutuhan cadangan pangan untuk 3 (tiga) bulan sebesar 939,798 Ton.

Upaya pencapaian dengan target tersebut melalui kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat sub kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat dengan target kegiatan jumlah lumbung pangan masyarakat yang difasilitasi sebanyak 40 terealisasi sebanyak 40. Fasilitas diberikan dalam bentuk gabah untuk dikelola sebagai cadangan pangan masyarakat masing-masing sebanyak 2,2 Ton GKG bagio 40 lumbung di 17 Kabupaten. Selain itu juga diberikan fasilitas Rice Milling Unit untuk 2 lumbung pangan masyarakat yaitu Kabupaten Sragen dan Wonogiri.

Bantuan Cadangan pangan (gabah) dan *Rice Mill Unit* tersebut sebagai stimulan kepada lumbung pangan agar di kelola sesuai dengan tata kelola masing-masing lumbung pangan serta dapat memotivasi, anggota lumbung pangan untuk swadaya memupuk/mengembangkan cadangan pangan yang dapat dimanfaatkan anggota/masyarakat pada saat-saat tertentu dan memperkuat kelembagaan sehingga menjadi lembaga yang lebih baik.

Kegiatan ini di dukung dengan dana sebesar 3.181.500.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 3.110.715.000,- atau terserap 97,78 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan, sisa anggaran merupakan sisa pagu kontrak pengisian lumbung pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah provinsi Jawa Tengah serta pengadaan Rice Mile Unit.

5. Persentase cadangan pangan yang dikelola dengan target sebesar 100% tercapai target sebesar 180%. Upaya pencapaian dengan target tersebut melalui kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat sub kegiatan pengembangan cadangan pangan pemerintah dengan target kegiatan sebesar 335 Ton GKG terealisasi sebesar 335,8 Ton GKG.

Provinsi Jawa Tengah dibawah koordinator Dinas Ketahanan Pangan mengelola cadangan pangan yang dimanfaatkan untuk intervensi penanganan rawan pangan transien maupun kronis. Pada Tahun 2019 mengelola sebanyak 272.244 Ton ekuivalen beras. Stock awal tahun 2019 gabah 298,25 ton (setara beras 172,985 ton) dan stock beras 0,25 ton. Total stock awal 173,235 ton setara beras. Pengadaan cadangan pangan pemerintah tahun 2019 sebesar 335,8 Ton GKG, jumlah cadangan pangan yang perlu disediakan pemerintah provinsi sebesar 200 Ton Ekuivalen Beras. Beras yang disalurkan kepada masyarakat sebanyak 152,3 Ton beras sehingga pada akhir tahun 2019 terdapat sisa stok gabah sebesar 342,040 Ton GKG dan 9,684 Ton Beras.

Kegiatan ini di dukung dengan dana sebesar Rp 3.181.500.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 3.110.715.000,- atau terserap 97,78 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan, sisa anggaran merupakan sisa pagu kontrak pengisian lumbung pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah provinsi Jawa Tengah serta pengadaan Rice Mile Unit.

Tabel 3.4. Rincian Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

| No. | Stock/Distribusi | Gabah (Kg) | Setara Beras (Kg) |
|-----|------------------------------------|------------|-------------------|
| 1 | Stock Gabah Per 31 Desember 2018 | 298.250 | 170.002 |
| 2 | Stock beras Per 31 Desember 2017 | | 250 |
| 3 | Pengadaan Tahun 2019 : | 335.800 | 191.406 |
| | Pengadaan yang dikelola Tahun 2018 | 634.050 | 361.658 |

- b. Capaian Indikator Sasaran Angka Kecukupan Gizi (Angka Konsumsi Energi dan Angka Konsumsi Protein)

Indikator sasaran angka kecukupan gizi dengan target Angka Konsumsi Energi sebesar 2.150 KKal/Kap/Hari dan Angka Konsumsi Protein sebesar 57 gram/Kap/Hari. Pencapaian target Angka Konsumsi Energi sebesar 100.05% atau sebesar 2.151 KKal/Kap/Hari dan target Angka

Konsumsi Protein sebesar 108,47% atau sebesar 61,83 gram/Kapita/Hari.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Angka Kecukupan Gizi (Angka Konsumsi Energi dan Angka Konsumsi Protein) telah mencapai 100,05% dan 108,47%. Angka Kecukupan Gizi merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan kecukupan rata-rata zat gizi sehari bagi hampir semua orang sehat untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Upaya pencapaian target kinerja tersebut dengan melaksanakan target program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu :

1. Indikator program rasio konsumsi pangan lokal dengan target sebesar 0,11. Pencapaian target sebesar 145,45% atau rasio konsumsi pangan lokal sebesar 0,16.



Upaya pencapaian target tersebut melalui Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Target kinerja kegiatan jumlah kelompok olahan pangan lokal yang difasilitasi sebanyak 50

tercapai sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menghasilkan produk olahan pangan lokal sumber karbohidrat selain beras dan terigu sesuai karakteristik daerah berbasis sumber daya lokal.

Kegiatan ini di dukung dengan dana sebesar Rp 750.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 696.406.000,- atau terserap 92,85 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan, sisa anggaran merupakan sisa pagu kontrak stimulan alat pengolahan pangan pendukung pengembangan pangan lokal dan fasilitasi alat pengolahan pangan lokal dengan penambahan zat gizi (fortifikasi).

2. Indikator program konsumsi beras (kg/kap/th) dengan target sebesar 99,1 kg/kap/th. Pencapaian target sebesar 96,77% atau konsumsi beras sebesar 95,9 kg/kap/th.



Upaya pencapaian target tersebut melalui Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Target kinerja kegiatan jumlah Promosi Pangan B2SA yang dilaksanakan sebanyak 7 tercapai

sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemberian edukasi, pada anak usia dini, pameran dan lomba cipta menu beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumberdaya lokal.

Kegiatan ini di dukung dengan dana sebesar Rp 570.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 531.100.000,- atau terserap 93,18 persen. Sisa anggaran bersumber dari kegiatan aplikasi jejaring E-commerce sebesar Rp. 38.900.000,- karena penyedia tidak lolos kualifikasi.

3. Indikator program konsumsi kelompok pangan buah dan sayur serta konsumsi kelompok pangan hewani dengan target berturut-turut sebesar 83 kg/kap/th dan 30 kg/kap/th. Pencapaian target konsumsi kelompok pangan buah dan sayur sebesar 115,90% atau konsumsi konsumsi kelompok pangan buah dan sayur sebesar 96,2 kg/kap/th dan target konsumsi kelompok pangan hewani sebesar 114,33% atau konsumsi konsumsi kelompok pangan hewani sebesar 34,3 kg/kap/th.



Upaya pencapaian target tersebut melalui Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Konsumsi Pangan B2SA. Target kinerja kegiatan jumlah kelompok pemanfaatan pekarangan yang difasilitasi sebanyak 125 tercapai

sebesar 100% dan jumlah sekolah yang diedukasi tentang penganekaragaman konsumsi pangan B2SA yang dilaksanakan sebanyak 12 tercapai sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Workshop Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan (OPP) bagi Pendamping kabupaten/kota sebanyak 40 orang, Bintek OPP bagi 125 kelompok calon penerima stimulan sebanyak 375 orang @ 3 orang/kelompok, terbagi dalam 6 wilayah eks karesidenan, Workshop

Konsumsi Pangan B2SA bagi Pendamping Kabupaten, Pendamping Sekolah dan Guru dan Pemberian Makan B2SA Siswa/Siswi pada 13 Sekolah SD/MI di 12 Kabupaten. Jumlah siswa/siswi yang mengikuti pemberian makan sebanyak 1.897 orang untuk 123 kali makan.

Kegiatan ini di dukung dengan dana sebesar Rp 1.650.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.577.361.750,- atau terserap 95,60 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan, sisa anggaran bersumber dari sisa pagu kontrak pengadaan stimulan bibit tanaman dan sarana pertanian, benih ikan, sarana produksi dan terpal untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan.

4. Indikator program persentase keamanan pangan segar dengan target sebesar 90%. Pencapaian target sebesar 109,08%. Pengawasan keamanan pangan di peredaran dilakukan oleh pengawas keamanan pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 526/35 Tahun 2017 tanggal 23 Mei 2017) serta melibatkan instansi terkait dengan keamanan pangan disepanjang rantai produksi pangan mengingat masalah keamanan pangan mencakup sepanjang rantai produksi pangan mulai dari budidaya hingga pangan dikonsumsi (*from farm to table*). Melalui JKPD langkah semua stakeholders dapat bersinergi untuk meningkatkan keamanan pangan. Tim juga bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan secara berkala terutama pada menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) untuk penjaminan terhadap kualitas dan mutu pangan baik segar maupun olahan yang beredar di masyarakat. Hasil pengawasan keamanan pangan segar yang dilakukan tahun 2019 seperti pada lampiran.

Upaya pencapaian target tersebut melalui

- a. Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan. Target kinerja kegiatan Jumlah sampel pangan segar yang aman yang diawasi (Kualitatif) sebanyak 500 tercapai sebesar 120% dan Jumlah Laporan Kajian Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar sebanyak 12 tercapai sebesar 100%. Kegiatan ini di dukung dengan dana



sebesar Rp 800.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 798.835.000,- atau terserap 99,85 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan, sisa

anggaran adalah efisiensi kegiatan.

- b. Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan: Target kinerja kegiatan Jumlah dokumen informasi keamanan pangan segar yang dihasilkan dan disebarluaskan



sebanyak 12 tercapai sebesar 100% dan jumlah masyarakat yang teredukasi tentang mutu dan keamanan pangan sebanyak 600 tercapai sebesar 100%. Kegiatan ini di dukung dengan dana sebesar Rp 600.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 597.700.000,- atau terserap 99,62 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan, sisa anggaran adalah efisiensi kegiatan

- c. Kegiatan Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Keamanan Pangan: Target kinerja kegiatan Jumlah kelompok yang dibina dalam pengembangan kelembagaan sebanyak 40 tercapai sebesar 100%. Kegiatan ini di dukung dengan dana sebesar Rp 775.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 749.655.000,- atau terserap 96,73 persen dengan demikian penggunaan anggaran



tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan, sisa anggaran adalah efisiensi pengadaan fasilitas peralatan pendukung mutu dan keamanan pangan.

5. Indikator program Persentase Jaminan Mutu Pangan yang diterbitkan dengan target sebesar 80%. Pencapaian target sebesar 119,29%.

Dinas Ketahanan Pangan melakukan pengawasan pangan untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D). OKKP-D Provinsi Jawa Tengah sebagai Lembaga Non Struktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2017 dan sebagai Ketua OKKP-D adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga sertifikasi dan pelabelan terhadap produk pangan segar asal tumbuhan dengan memberikan Sertifikat Prima 3 dan Pendaftaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Sertifikasi Prima 3 dan Pendaftaran PSAT merupakan salah satu bentuk pengakuan atau jaminan bahwa pangan tersebut aman untuk dikonsumsi disamping kualitas/mutu yang terjamin. Jaminan tersebut sesuai dengan permintaan pasar baik pasar Luar Negeri maupun pasar dalam negeri. Dampak dari bentuk jaminan tersebut, maka produk pangan segar yang sudah bersertifikat mampu bersaing dengan produk impor dan mampu menembus pasar-pasar modern, sehingga ada perbaikan harga dibanding pangan yang belum bersertifikat. Selain itu juga ada dampak peningkatan kualitas produksi pada kelompok yang sudah disertifikasi. Karena kelompok yang telah disertifikasi harus menerapkan GAP (penanganan produksi yang baik dan benar). Tahun 2019, OKKP-D menerbitkan 183 nomor pendaftaran PSAT, 8 sertifikat terdiri dari 2 sertifikat rumah kemas, 5 sertifikat Prima 3, 1 sertifikat Prima 2 dan 18 jaminan mutu pangan lainnya terdiri dari 10 sertifikat kesehatan untuk mendukung ekspor pala dan 8 sertifikat organik serta 20 survailan sertifikat organik.

Upaya pencapaian target tersebut melalui:

- a. Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi Jaminan Mutu Pangan. Target kinerja kegiatan :
 - i. Jumlah sertifikat yang diterbitkan sebanyak 7 tercapai sebesar 114,29%.

- ii. Jumlah register yang diterbitkan sebanyak 51 tercapai sebesar 358,82%.
- iii. Jumlah jaminan mutu pangan lain yang diterbitkan (selain PSAT dan Prima 3) sebanyak 7 tercapai sebesar 257,13%.
- iv. Surveilen jaminan mutu pangan (kelompok) sebanyak 18 tercapai sebesar 111,11%.



Kegiatan ini di dukung dengan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.952.592.489 atau terserap 97,63 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah

dilaksanakan sesuai perencanaan, sisa anggaran berupa efisiensi belanja dekorasi/dokumentasi, peralatan pengambilan sampel, jasa sertifikasi, honorarium narasumber, sewa kamar, makan minum, perjalanan daerah dan pemeliharaan aplikasi OKKPD.

- b. Kegiatan Pengujian Mutu Pangan. Target kinerja kegiatan :
 - i. Jumlah sampel pangan yang diuji sebanyak 75 tercapai sebesar 345,33%
 - ii. Jumlah rekomendasi hasil uji sebanyak 75 tercapai sebesar 342,67%.

Kegiatan ini di dukung dengan dana sebesar Rp 1.300.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.243.380.278,- atau terserap 95,74 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan, sisa anggaran berupa efisiensi belanja bahan laboratorium, sertifikasi alat dan akreditasi laboratorium, uji laboratorium, analisa laboratorium, makan minum, perjalanan, inhouse training dan pengadaan milling meter.

Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

Capaian kinerja sasaran 2 tercapai sebesar 124,29 % atau kategori sangat Baik. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD telah tercapai sebesar 124,29% dari target akhir Tahun Renstra. Indikator kinerja sasaran

ini merupakan indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra 2018-2023 dan belum menjadi indikator dalam Renstra lama sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Tabel 3.5.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

| No | Indikator Kinerja | Real. 2018 | Tahun 2019 | | | Target Akhir Renstra (2023) | % Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2019) |
|---|---------------------------|------------|------------|-------|---------------|-----------------------------|--|
| | | | Target | Real. | % Capaian | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Nilai Kepuasan Masyarakat | 70 | 70 | 87 | 124,29 | 70 | 124,29 |
| Prosentase Capaian Sasaran Strategis | | | | | 124,29 | | 124,29 |

Dari tabel 3.5 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 2 tercapai sebesar 124,29% atau kategori sangat Baik. Upaya pencapaian target kinerja tersebut dengan melaksanakan target program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu :

1. Indikator program persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah dengan target sebesar 100%. Pencapaian target sebesar 100%. Upaya pencapaian target tersebut melalui 16 (enam belas) kegiatan pada sekretariat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dan 10 (sepuluh) kegiatan pada Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yaitu:
 - a. *Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah*
 - i. Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
 - ii. Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
 - iii. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
 - iv. Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah

- v. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
 - vi. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
 - vii. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
 - viii. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
 - ix. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
 - x. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
 - xi. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
 - xii. Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
 - xiii. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
 - xiv. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - xv. Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
 - xvi. Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
- b. *Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah*
- i. Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
 - ii. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
 - iii. Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
 - iv. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
 - v. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
 - vi. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah

- vii. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
- viii. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
- ix. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
- x. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran

Target dan capaian kinerja kegiatan secara rinci pada Lampiran 3. Pelaksanaan program ini di dukung dengan dana sebesar Rp3.755.500.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp3.545.830.085- atau terserap 94,43 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan, sisa anggaran berupa efisiensi belanja barang dan jasa, sisa pagu kegiatan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik sekretariat dan sisa kegiatan rehab gedung kantor, pembangunan gedung kantor dan pengadaan pakaian dinas serta sisa mati belanja Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah pada Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Dishanpan karena belum ada serah terima asset dari Distanbun Prov. Jateng.

Sasaran 3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Capaian kinerja sasaran 3 tercapai sebesar 112,06% atau kategori Sangat Baik. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD telah tercapai sebesar 112,06% dari target akhir Tahun Renstra. Indikator kinerja sasaran ini merupakan indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra 2018-2023 dan belum menjadi indikator dalam Renstra lama. sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Namun secara absolut dapat dilihat bahwa capaian nilai SAKIP PD meningkat dari capaian 2018 sebesar 0,92 point.

Tabel 3.6.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

| No | Indikator Kinerja | Real. 2018 | Tahun 2019 | | | Target Akhir Renstra (2023) | % Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2019) |
|---|-------------------|------------|------------|-------|---------------|-----------------------------|--|
| | | | Target | Real. | % Capaian | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Nilai SAKIP PD | 88,73 | 80 | 89,65 | 112,06 | 80 | 112,06 |
| Prosentase Capaian Sasaran Strategis | | | | | 112,06 | | 112,06 |

Upaya pencapaian target kinerja tersebut dengan melaksanakan target program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu :

1. Indikator program Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD dengan target sebesar 100%. Pencapaian target sebesar 100%. Upaya pencapaian target tersebut melalui 2 (dua) kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target sebanyak 2 dokumen tercapai sebesar 100%. Dokumen perencanaan yang disusun antara lain dokumen Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020 dan dokumen Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020. Selain itu Dinas Ketahanan Pangan juga berkontribusi dalam penyediaan data dalam penyusunan draft Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah (RKPD) Tahun 2020.



- b. Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target sebanyak 2 dokumen tercapai sebesar 100%. Dokumen evaluasi yang disusun antara lain dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Laporan Tahunan Program Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Selain itu Dinas Ketahanan Pangan juga berkontribusi dalam penyediaan data dalam penyusunan

draft laporan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Pelaksanaan program ini di dukung dengan dana sebesar Rp 675.000.000,- dengan realisasi anggaran RP 590.560.350- atau terserap 87,49 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan, sisa anggaran berupa efisiensi belanja barang dan jasa dalam penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan dokumen evaluasi kinerja dan perjalanan dinas.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2019, didukung APBD sebesar Rp 38.509.216.000,- (Tiga puluh delapan milyar lima ratus sembilan juta dua ratus enam belas ribu tupiah) secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

- a. Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp15.009.216.000,- digunakan untuk Belanja Pegawai, terserap Rp 14.940.437.740 (99,54%), dengan capaian fisik 100%.
- b. Belanja Langsung, sebesar Rp 23.500.000.000,- digunakan untuk:
 1. Belanja Pegawai Rp. 2.265.800.000,-
 2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 20.764.200.000,-
 3. Belanja Modal sebesar Rp. 470.000.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

| Sasaran | Program | Anggaran | Realisasi | % Realisasi |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | 19.070.000.000,- | 18.586.161.492,- | 97.46 |

| Sasaran | Program | Anggaran | Realisasi | % Realisasi |
|---|--|-----------------|-----------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah | Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah | 3.755.000.000,- | 3.255.870.675,- | 86,71 |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 675.000.000,- | 590.560.350,- | 87,49 |

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 23.500.000.000,- terserap Rp. 22.722.551.927,- (96,69%), dengan capaian fisik 99,60%. Sisa anggaran Rp. 777.448.073,- (3,31%) berasal dari efisiensi kegiatan, sisa pengadaan barang/jasa, sisa mati pengadaan e-commerce yang tidak dilaksanakan karena penyedia tidak lulus kualifikasi LPSE, dan belanja Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah pada Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Dishanpan karena belum ada serah terima asset dari Distanbun Prov. Jateng.

Selanjutnya dari total realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung untuk Dinas Ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar 97,80% lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yaitu 97,51%,

Dalam menunjang pencapaian sasaran tahun 2019 pelaksanaan Program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan sehingga dengan tercapainya indikator sasaran maka sisa anggaran dapat dikategorikann sebagai efisiensi karena berasal dari selisih atas negosiasi belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas yang dioptomalkan.

Realisasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 secara terinci dapat dilihat pada Lampiran 2.

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD teknis yang memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan salah satu fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah berhasil dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan **kategori Sangat Baik**. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

1. Capaian kinerja **sasaran 1** meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas tercapai sebesar **104,25%** atau **kategori Sangat Baik**.
2. Capaian kinerja **sasaran 2** meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah tercapai sebesar **124,29%** atau **kategori Sangat Baik**.
3. Capaian kinerja **sasaran 3** Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah tercapai sebesar **112,06%** atau **kategori Sangat Baik**.

B. Permasalahan/Kendala.

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 antara lain :

1. Data yang digunakan sebagai sumber analisis kondisi ketahanan pangan time lagnya terlalu lama.
2. Dinamika kebijakan dan regulasi terkait pangan yang begitu cepat.

3. Perkembangan masyarakat dan teknologi berdampak pada tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang baik.
4. Prestasi kerja belum sepenuhnya diterapkan dalam reward and punishment.

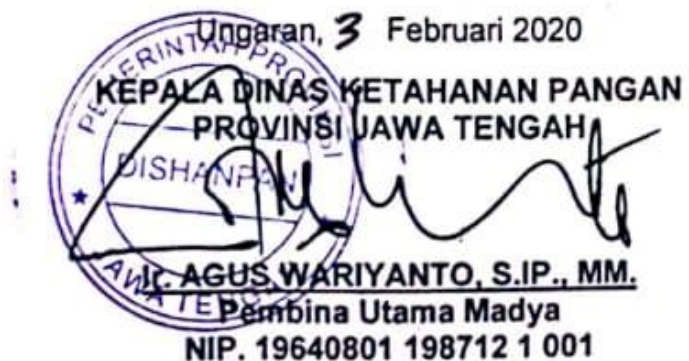
C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang antara lain:

1. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan sinkronisasi data baik antar Perangkat Daerah maupun *stakeholders* lainnya sesuai kewenangan masing-masing namun saling mendukung dan pengembangan Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA).
2. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam menerapkan regulasi yang berubah.
3. Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan manajemen pelayanan dan akreditasi laboratorium sebagai salah satu unit pelayanan publik.
4. Mengembangkan sistem jaminan mutu dan meningkatkan pengawasan keamanan pangan, untuk menjamin tersedianya pangan yang beredar dimasyarakat aman dikonsumsi dan bermutu baik, serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan di pasar global.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2019 untuk Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Ungaran, 3 Februari 2020



**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

AGUS WARIYANTO, S.IP., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640801 198712 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972, 6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. AGUS WARIYANTO, S.IP., MM.

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

Jabatan : Gubernur Jawa Tengah

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 7 Februari - 2019

Pihak Kedua,
GUBERNUR JAWA TENGAH



H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. AGUS WARIYANTO, S.IP., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640801 198712 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

| Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|--|---|---------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Tujuan 1 | | |
| Meningkatkan ketahanan pangan | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | 87,36 |
| Sasaran : | | |
| Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas | PPH Ketersediaan | 80,02 |
| | Angka Konsumsi Energi | 2.150 kkal/kap/hari |
| | Angka Konsumsi Protein | 57 gr/kap/hari |
| Tujuan 2 | | |
| Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah | Nilai Kepuasan Masyarakat | 70 |
| Sasaran : | | |
| 1. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah | Nilai Kepuasan Masyarakat | 70 |


| Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|--|-------------------|--------|
| (1) | (2) | (3) |
| 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai SAKIP PD | 76 |

| Program | Anggaran | Keterangan |
|---|----------------------|------------|
| 1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah | Rp. 3.755.000.000,- | APBD |
| 2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp. 675.000.000,- | APBD |
| 3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Rp. 19.070.000.000,- | APBD |
| 4. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Rp. 40.797.550.000,- | APBN |

Semarang, 7 FEBRUARI = 2019

Pihak Kedua
GUBERNUR JAWA TENGAH

H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

Pihak Pertama
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. AGUSWARIYANTO, S.IP., MM.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19640801 198712 1 001

mpiran 2.

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung APBD TA. 2019

| No | Program/ Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % | Selisih |
|----|--|---------------|---------------|---------|------------|
| | Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah - Dinas Ketahanan Pangan | 3.755.000.000 | 3.545.830.085 | 94,4296 | |
| 1 | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | 22.500.000 | 22.500.000 | 100,00 | - |
| 2 | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 66.000.000 | 65.978.000 | 99,97 | 22.000 |
| 3 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah | 256.375.000 | 218.589.540 | 85,26 | 37.785.460 |
| 4 | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | 85.000.000 | 84.565.365 | 99,49 | 434.635 |
| 5 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 1.197.625.000 | 1.154.102.000 | 96,37 | 43.523.000 |
| 6 | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 600.000.000 | 599.023.445 | 99,84 | 976.555 |
| 7 | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 28.750.000 | 28.477.500 | 99,05 | 272.500 |
| 8 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 19.000.000 | 18.999.000 | 99,99 | 1.000 |
| 9 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | 393.750.000 | 388.997.825 | 98,79 | 4.752.175 |
| 10 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah | 226.500.000 | 226.473.000 | 99,99 | 27.000 |
| 11 | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | 65.000.000 | 64.425.000 | 99,12 | 575.000 |
| 12 | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah | 200.000.000 | 199.882.000 | 99,94 | 118.000 |
| 13 | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas | 75.000.000 | 74.820.000 | 99,76 | 180.000 |
| 14 | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 50.000.000 | 50.000.000 | 100,00 | - |
| 15 | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah | 30.500.000 | 16.548.000 | 54,26 | 13.952.000 |
| 16 | Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 42.500.000 | 42.490.000 | 99,98 | 10.000 |

| No | Program/ Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % | Selisih |
|----|--|-------------|-------------|--------|------------|
| | Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah - Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan | | | | |
| 17 | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00 | - |
| 18 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah | 135.000.000 | 69.409.198 | 51,41 | 65.590.802 |
| 19 | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | 40.000.000 | - | 0,00 | 40.000.000 |
| 20 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 72.000.000 | 71.983.212 | 99,98 | 16.788 |
| 21 | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 35.000.000 | 34.352.500 | 98,15 | 647.500 |
| 22 | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 7.000.000 | 6.940.000 | 99,14 | 60.000 |
| 23 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 5.000.000 | 4.985.000 | 99,70 | 15.000 |
| 24 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | 50.000.000 | 49.880.000 | 99,76 | 120.000 |
| 25 | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | 25.000.000 | 24.909.500 | 99,64 | 90.500 |
| 26 | Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran | 22.500.000 | 22.500.000 | 100,00 | - |
| | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Dinas Ketahanan Pangan | | | | |
| 27 | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 325.000.000 | 300.959.100 | 92,60 | 24.040.900 |
| 28 | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 350.000.000 | 289.601.250 | 82,74 | 60.398.750 |

| No | Program/ Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % | Selisih |
|----|---|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| | PANGAN | | | | |
| | Peningkatan Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan | | | | |
| 29 | Peningkatan Ketersediaan Pangan | 150.000.000 | 150.000.000 | 100,00 | - |
| 30 | Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Pangan | 250.000.000 | 214.100.000 | 85,64 | 35.900.000 |
| 31 | Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat | 3.900.000.000 | 3.831.941.975 | 98,25 | 68.058.025 |
| | Peningkatan Ketahanan Pangan - Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan | | | | |
| 32 | Pemantauan Harga dan Stabilisasi Harga Pangan | 893.500.000 | 889.225.000 | 99,52 | 4.275.000 |
| 33 | Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Peningkatan Akses Pangan | 2.250.000.000 | 2.243.149.000 | 99,70 | 6.851.000 |
| 34 | Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat | 3.181.500.000 | 3.110.715.000 | 97,78 | 70.785.000 |
| | Peningkatan Ketahanan Pangan - Bidang Konsumsi dan | | | | |
| 35 | Pengembangan pemanfaatan pekarangan dan konsumsi pangan B2SA | 1.650.000.000 | 1.577.361.750 | 95,60 | 72.638.250 |
| 36 | Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal | 750.000.000 | 696.406.000 | 92,85 | 53.594.000 |
| 37 | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan | 570.000.000 | 531.100.000 | 93,18 | 38.900.000 |
| | Peningkatan Ketahanan Pangan - Bidang Keamanan Pangan | | | | |
| 38 | Peningkatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan | 600.000.000 | 597.700.000 | 99,62 | 2.300.000 |
| 39 | Pengawasan Keamanan Pangan | 800.000.000 | 798.835.000 | 99,85 | 1.165.000 |
| 40 | Pengembangan Kelembagaan Keamanan Pangan | 775.000.000 | 749.655.000 | 96,73 | 25.345.000 |
| | Peningkatan Ketahanan Pangan - Balai Peningkatan Mutu dan | | | | |
| 41 | Sertifikasi dan Registrasi Jaminan Mutu Pangan | 2.000.000.000 | 1.952.592.489 | 97,63 | 47.407.511 |
| 42 | Pengujian Mutu Pangan | 1.300.000.000 | 1.243.380.278 | 95,64 | 56.619.722 |
| | * Jumlah/Rata-rata | 23.500.000.000 | 22.722.551.927 | 96,69 | 777.448.073 |

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

URUSAN : NON URUSAN
PROGRAM : Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah

| No | KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | RKPD TA 2019 | | DPPA TA 2019 | | PELAKSANAAN KINERJA | | PELAKSANAAN APBD | | UNIT KERJA | KETERANGAN |
|----|--|--------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|---|
| | | | TARGET KINERJA | PAGU ANGGARAN (Rp) | TARGET KINERJA | PAGU ANGGARAN (Rp) | REALISASI KINERJA OUTPUT | TINGKAT KETERCAPAIAN KINERJA OUTPUT | REALISASI FISIK | REALISASI KEUANGAN | | |
| 1 | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | | | 22.500.000 | | 22.500.000 | | | 100,00% | 100,00% | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) | Bulan | 12 | | 12 | | 12 | 100% | | | | |
| 2 | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | | | 66.000.000 | | 66.000.000 | | | 100,00% | 99,97% | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | Bulan | 12 | | 12 | | 12 | 100% | | | | |
| 3 | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | 100,00% | 100,00% | BPMKP | |
| | Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | Bulan | 12 | | 12 | | 12 | 100% | | | | |
| 4 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah | | | 256.375.000 | | 256.375.000 | | | 100,00% | 85,25% | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah | Bulan | 12 | | 12 | | 12 | 100% | | | | |
| 5 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah | | | 135.000.000 | | 135.000.000 | | | 100,00% | 51,41% | BPMKP | |
| | Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah | Bulan | 12 | | 12 | | 12 | 100% | | | | |
| 6 | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | | | 85.000.000 | | 85.000.000 | | | 100,00% | 99,49% | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | Jumlah tahun terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah | Tahun | 1 | | 1 | | 1 | 100% | | | | |
| 7 | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | 0,00% | 0,00% | BPMKP | |
| | Jumlah tahun terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah | Tahun | 1 | | 1 | | 0 | 0% | | | | Belum serah terima aset dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah |
| 8 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | | | 1.197.625.000 | | 1.197.625.000 | | | 100,00% | 96,37% | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | Bulan | 12 | | 12 | | 12 | 100% | | | | |

| No | KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | RKPD TA 2019 | | DPPA TA 2019 | | PELAKSANAAN KINERJA | | PELAKSANAAN APBD | | UNIT KERJA | KETERANGAN |
|----|---|--------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|------------|
| | | | TARGET KINERJA | PAGU ANGGARAN (Rp) | TARGET KINERJA | PAGU ANGGARAN (Rp) | REALISASI KINERJA OUTPUT | TINGKAT KETERCAPAIAN KINERJA OUTPUT | REALISASI FISIK | REALISASI KEUANGAN | | |
| 9 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | | | 72.000.000 | | 72.000.000 | | | 100,00% | 99,98% | BPMKP | |
| | Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | Bulan | 12 | | 12 | | 12 | 100% | | | | |
| 10 | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | | 100,00% | 99,84% | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah | Bulan | 12 | | 12 | | 12 | 100% | | | | |
| 11 | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | | 100,00% | 98,15% | BPMKP | |
| | Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah | Bulan | 12 | | 12 | | 12 | 100% | | | | |
| 12 | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | | | 28.750.000 | | 28.750.000 | | | 100,00% | 99,05% | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | Bulan | 12 | | 12 | | 12 | 100% | | | | |
| 13 | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | | 100,00% | 99,14% | BPMKP | |
| | Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | Bulan | 12 | | 12 | | 12 | 100% | | | | |
| 14 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | | | 19.000.000 | | 19.000.000 | | | 100,00% | 99,99% | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | Bulan | 12 | | 12 | | 12 | 100% | | | | |
| 15 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | 100,00% | 99,70% | BPMKP | |
| | Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | Bulan | 12 | | 12 | | 12 | 100% | | | | |
| 16 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | | | 393.750.000 | | 393.750.000 | | | 100,00% | 98,79% | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | Bulan | 12 | | 12 | | 12 | 100% | | | | |

| No | KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | RKPD TA 2019 | | DPPA TA 2019 | | PELAKSANAAN KINERJA | | PELAKSANAAN APBD | | UNIT KERJA | KETERANGAN |
|----|---|--------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|------------|
| | | | TARGET KINERJA | PAGU ANGGARAN (Rp) | TARGET KINERJA | PAGU ANGGARAN (Rp) | REALISASI KINERJA OUTPUT | TINGKAT KETERCAPIAN KINERJA OUTPUT | REALISASI FISIK | REALISASI KEUANGAN | | |
| 17 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | 100,00% | 99,76% | BPMKP | |
| | Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | Bulan | 12 | | 12 | | 12 | 100% | | | | |
| 18 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | | | 226.500.000 | | 226.500.000 | | | 100,00% | 99,99% | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | Bulan | 12 | | 12 | | 12 | 100% | | | | |
| 19 | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | | 100,00% | 99,12% | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah | Unit | 6 | | 9 | | 9 | 100% | | | | |
| 20 | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | 100,00% | 99,64% | BPMKP | |
| | Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah | Unit | 5 | | 5 | | 5 | 100% | | | | |
| 21 | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | 100,00% | 99,94% | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | Jumlah Unit Gedung Yang Direhab | Unit | 2 | | 2 | | 2 | 100% | | | | |
| 22 | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | 100,00% | 99,76% | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan | Unit | 100 | | 100 | | 100 | 100% | | | | |
| 23 | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | 100,00% | 100,00% | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar | Orang | 30 | | 30 | | 30 | 100% | | | | |
| 24 | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah | | | 30.500.000 | | 30.500.000 | | | 100,00% | 54,26% | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah | Bulan | 12 | | 12 | | 12 | 100% | | | | |
| 25 | Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran | | | 22.500.000 | | 22.500.000 | | | 100,00% | 100,00% | BPMKP | |
| | Jumlah bulan tersedianya sarana pelengkap pendukung perkantoran | Bulan | 12 | | 12 | | 12 | 100% | | | | |

| No | KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | RKPD TA 2019 | | DPPA TA 2019 | | PELAKSANAAN KINERJA | | PELAKSANAAN APBD | | UNIT KERJA | KETERANGAN |
|----|--|--------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|------------|
| | | | TARGET KINERJA | PAGU ANGGARAN (Rp) | TARGET KINERJA | PAGU ANGGARAN (Rp) | REALISASI KINERJA OUTPUT | TINGKAT KETERCAPAIAN KINERJA OUTPUT | REALISASI FISIK | REALISASI KEUANGAN | | |
| 26 | Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah | | | 42.500.000 | | 42.500.000 | | | 100,00% | 99,98% | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah | Bulan | 12 | | 12 | | 12 | 100% | | | | |
| | Total | | | 3.755.000.000 | | 3.755.000.000 | | | 98,93 | 94,43 | | |

URUSAN : NON URUSAN
PROGRAM : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

| No | KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | RKPD TA 2019 | | DPPA TA 2019 | | PELAKSANAAN KINERJA | | PELAKSANAAN APBD | | UNIT KERJA | KETERANGAN |
|----|---|---------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|------------|
| | | | TARGET KINERJA | PAGU ANGGARAN (Rp) | TARGET KINERJA | PAGU ANGGARAN (Rp) | REALISASI KINERJA OUTPUT | TINGKAT KETERCAPAIAN KINERJA OUTPUT | REALISASI FISIK | REALISASI KEUANGAN | | |
| 1 | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 325.000.000 | | 325.000.000 | | | 100,00% | 92,60% | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | Dokumen | 2 | | 2 | | 2 | 100% | | | | |
| 2 | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | | 100,00% | 82,74% | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah yang disusun | Dokumen | 2 | | 2 | | 2 | 100% | | | | |
| | Total | | | 675.000.000 | | 675.000.000 | | | 100,00 | 87,49 | | |
| | Total | | | 4.430.000.000 | | 4.430.000.000 | | | 99,10 | 93,37 | | |

Ungaran, 10 Januari 2020
Mengetahui,



REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

URUSAN
PROGRAM

: PANGAN
: Peningkatan Ketahanan Pangan

| No | KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | RKPD TA 2019 | | DPPA TA 2019 | | PELAKSANAAN KINERJA | | PELAKSANAAN APBD | | UNIT KERJA | KETERANGAN |
|----|--|----------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| | | | TARGET KINERJA | PAGU ANGGARAN (Rp) | TARGET KINERJA | PAGU ANGGARAN (Rp) | REALISASI KINERJA OUTPUT | TINGKAT KETERCAPIAN KINERJA OUTPUT | REALISASI FISIK | REALISASI KEUANGAN | | |
| 1 | Peningkatan Ketersediaan Pangan | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | 100,00% | 100,00% | Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan | |
| | Jumlah rekomendasi yang disusun | Laporan | 1 | | 1 | | 1 | 100% | | | | |
| 2 | Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Pangan | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | 100,00% | 85,64% | Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan | |
| | Jumlah kelompok yang difasilitasi Stimulan umbi-umbian | Kelompok | 5 | | 5 | | 5 | 100% | | | | |
| | Tersedianya data KP2LB/LP2B (Jateng) | Laporan | 1 | | 1 | | 1 | 100% | | | | |
| 3 | Pemantauan Harga dan Stabilisasi Harga Pangan | | | 893.500.000 | | 893.500.000 | | | 100,00% | 99,52% | Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan | |
| | Fasilitasi Toko Tani Indonesia (TTI) Center | Unit | 1 | | 1 | | 1 | 100% | | | | |
| | Jumlah intervensi harga pangan strategis (Beras, Cabe, Bawang Merah) | Kali | 5 | | 5 | | 10 | 200% | | | | |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Peningkatan Akses Pangan | | | 2.250.000.000 | | 2.250.000.000 | | | 100,00% | 99,70% | Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan | |
| | Data pelaksanaan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan strategis dan pangan pokok serta sistem logistik daerah | Laporan | 1 | | 1 | | 1 | 100% | | | | |
| | Jumlah kelompok yang difasilitasi Stimulan Gabah pada Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (gapoktan) | Kelompok | 35 | | 35 | | 35 | 100% | | | | |
| | Jumlah percontohan usaha petani berbasis korporasi | Unit | 2 | | 2 | | 2 | 100% | | | | |
| | Promosi Produk Pertanian | Kali | 4 | | 4 | | 4 | 100% | | | | |
| 5 | Pengembangan pemanfaatan pekarangan dan konsumsi pangan B2SA | | | 1.650.000.000 | | 1.650.000.000 | | | 100,00% | 95,60% | Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan | |
| | 1. Jumlah kelompok penerima Stimulan benih/bibit tanaman, ikan untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan | Kelompok | 125 | | 125 | | 125 | 100% | | | | |
| | Analisa PPH | Laporan | 1 | | 1 | | 1 | 100% | | | | |
| | Jumlah sekolah penerima Stimulan edukasi pangannekaragaman konsumsi pangan | Paket | 12 | | 12 | | 12 | 100% | | | | |
| 6 | Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal | | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | | 100,00% | 92,85% | Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan | |
| | Data potensi pangan lokal | Buku | 1 | | 1 | | 1 | 100% | | | | |
| | Jumlah kelompok pengembang pangan pokok lokal yang difasilitasi | Kelompok | 2 | | 2 | | 2 | 100% | | | | |
| | Jumlah kelompok pengembang pangan olahan lokal yang difasilitasi | Kelompok | 50 | | 50 | | 50 | 100% | | | | |
| 7 | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan | | | 570.000.000 | | 570.000.000 | | | 93,18% | 93,18% | Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan | |
| | Jumlah Promosi Pangan B2SA yang dilaksanakan | Kali | 7 | | 7 | | 7 | 100% | | | | |

| No | KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | RKPD TA 2019 | | DPPA TA 2019 | | PELAKSANAAN KINERJA | | PELAKSANAAN APBD | | UNIT KERJA | KETERANGAN |
|----|---|------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|--|--|
| | | | TARGET KINERJA | PAGU ANGGARAN (Rp) | TARGET KINERJA | PAGU ANGGARAN (Rp) | REALISASI KINERJA OUTPUT | TINGKAT KETERCAPIAN KINERJA OUTPUT | REALISASI FISIK | REALISASI KEUANGAN | | |
| 8 | Peningkatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan | | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | | 100,00% | 99,62% | Bidang Keamanan Pangan | |
| | Jumlah dokumen informasi keamanan pangan segar yang dihasilkan dan disebarluaskan | Dokumen | 12 | | 12 | | 12 | 100% | | | | |
| | Jumlah masyarakat yang teredukasi tentang mutu dan keamanan pangan | Orang | 600 | | 600 | | 600 | 100% | | | | |
| 9 | Pengawasan Keamanan Pangan | | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | | 100,00% | 99,85% | Bidang Keamanan Pangan | |
| | Jumlah sampel pangan segar yang diawasi (Kualitatif) | sampel | 500 | | 500 | | 600 | 120% | | | | |
| | Jumlah Laporan Kajian Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar | Dokumen | 12 | | 12 | | 12 | 100% | | | | |
| 10 | Pengembangan Kelembagaan Keamanan Pangan | | | 775.000.000 | | 775.000.000 | | | 100,00% | 96,73% | Bidang Keamanan Pangan | |
| | Jumlah kelompok/pelaku usaha yang dibina dalam pengembangan kelembagaan | Kelompok | 40 | | 40 | | 40 | 100% | | | | |
| 11 | Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat | | | 3.900.000.000 | | 3.900.000.000 | | | 100,00% | 98,25% | Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan | |
| | Jumlah desa yg diberdayakan sbg upaya penanganan kerawanan pangan | Desa | 34 | | 34 | | 34 | 100% | | | | |
| | Peta SKPG dan atau FSVA | Laporan | 1 | | 1 | | 1 | 100% | | | | |
| 12 | Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat | | | 3.181.500.000 | | 3.181.500.000 | | | 100,00% | 97,78% | Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan | |
| | Jumlah CPP yang disediakan (beras) | Ton | 200 | | 335 | | 335 | 100% | | | | |
| | Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang difasilitasi | Unit | 40 | | 40 | | 40 | 100% | | | | |
| 13 | Pengujian Mutu Pangan | | | 1.300.000.000 | | 1.300.000.000 | | | 100,00% | 95,64% | Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan | |
| | Jumlah sampel pangan yang diuji | sampel | 75 | | 75 | | 259 | 345,33% | | | | |
| | Jumlah rekomendasi hasil uji | Dokumen | 75 | | 75 | | 259 | 345,33% | | | | |
| 14 | Sertifikasi dan Registrasi Jaminan Mutu Pangan | | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | | 100,00% | 97,63% | Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan | |
| | Jumlah sertifikat yang diterbitkan | Sertifikat | 7 | | 7 | | 8 | 114,29% | | | | |
| | Jumlah register yang diterbitkan | Sertifikat | 51 | | 51 | | 183 | 358,82% | | | | mengajukan pengujian dengan biaya mandiri karena adanya kewajiban yg mengatur pendaftaran PSAT dalam kemasan |
| | Jaminan mutu pangan lainnya | Sertifikat | 7 | | 7 | | 18 | 257,14% | | | | Penambahan sertifikat HC (Health Sertificate) |
| | Surveilen jaminan mutu pangan | Kelompok | 18 | | 18 | | 20 | 111,11% | | | | |
| | Total | | | 19.070.000.000 | | 19.070.000.000 | | | 99,80 | 97,46 | | |
| | Total | | | 19.070.000.000 | | 19.070.000.000 | | | 99,80 | 97,46 | | |

Ungaran, 10 Januari 2020

Mengetahui,

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN



I. AGUS WIRIYANTO, S.IP., I.MM

NIP. 196408011987121001